

DEMOKRASI SEBAGAI KAMP KONSENTRASI

# DUA BULANAN



**K**risis  
Adalah  
Bagian dari  
DNA Kita

---

**A**yu Utami:  
50 Tahun Berbusana,  
75 Tahun Bernegara

---

**F**esyen Etnikal:  
*Klambine*  
*Cara Jawa,*  
*Regane*  
*Cara Landa*

VITA LONGA, 2019  
karya SIGIT SANTOSO

Rp 25.000.00

DUA BULANAN, NOMOR 03 - 04, TAHUN KE-69, 2020



# Demokrasi sebagai Kamp Konsentrasi

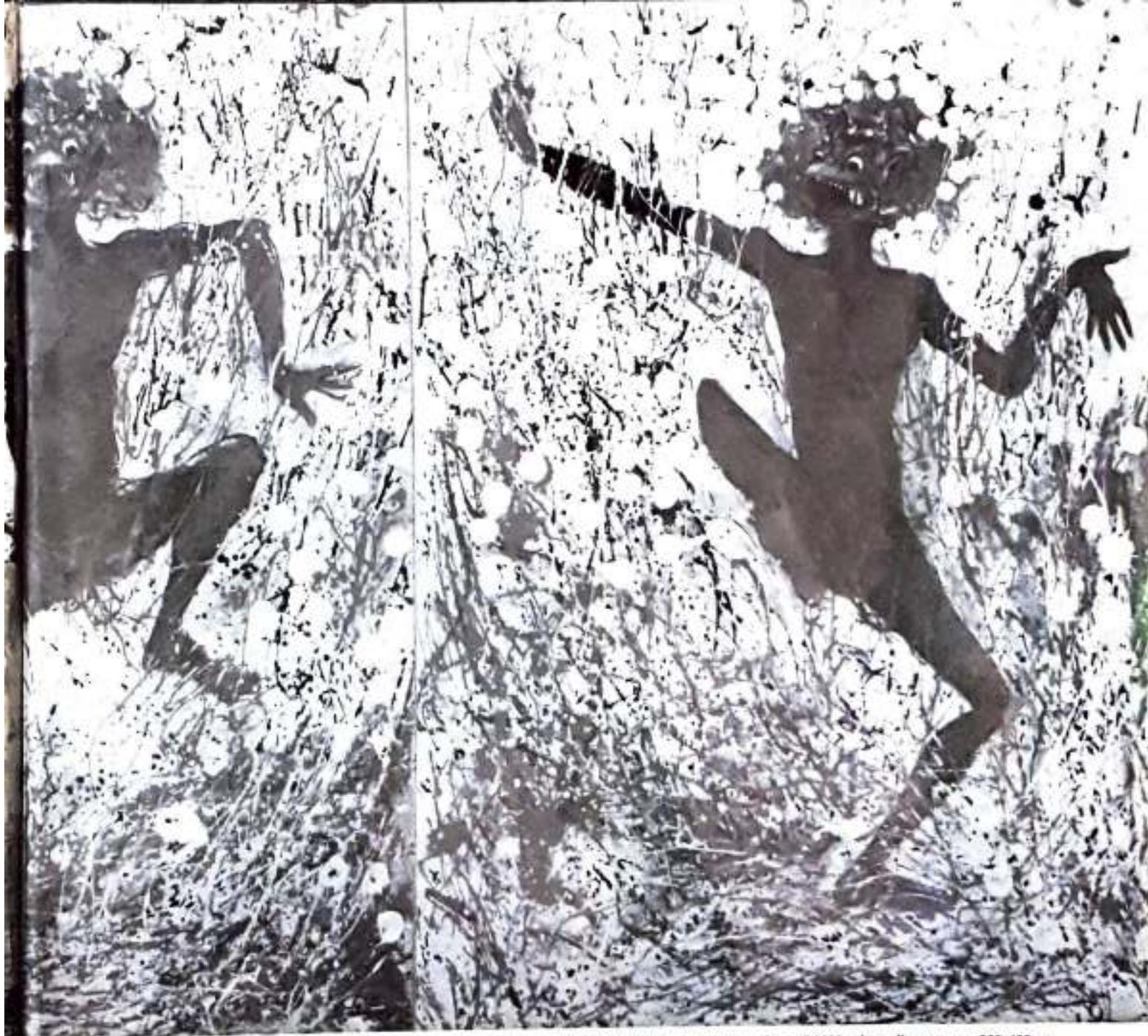
## **GIORGIO AGAMBEN:**

### **Filsafat Politik dan Kritik**

**A. SETYO WIBOWO**

Demokrasi biasanya lahir dari keadaan darurat, entah itu revolusi, reformasi, atau *people power*. Namun, begitu demokrasi menjadi rezim resmi, menurut Giorgio Agamben, demokrasi justru senang mendeklarasikan keadaan darurat. Demokrasi ternyata "mengadopsi keadaan darurat sebagai bagian integral dari mode penyelenggaraan kekuasaan". Maka kita sering mendengar seruan "darurat pengungsi, darurat radikalisme, darurat narkoba, darurat bencana", dan lain-lain. Agamben menuduh bahwa demokrasi yang kita hidupi saat ini tak lain adalah sebuah kamp konsentrasi.

(Agus Sudibyo, *Demokrasi dan Kedaruratan*)



Lukisan karya: PUTU SUTAWIDJAYA, "Terbudak Bunga-bunga", 2019, mix media on canvas, 200x450 cm

**A**gus Sudibyo, lewat bukunya *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben* (Tangerang: Marjin Kiri, 2019, "Kata Pengantar" oleh: M. Sastrapratedja SJ, 326 halaman) menawarkan sebuah filsafat kontemporer karya Giorgio Agamben, pemikir Italia yang masih hidup saat ini. Buku ini merupakan olahan ulang dari disertasi filsafat program doctoral (S3) Agus Sudibyo di STF Driyarkara yang telah diuji pada tanggal 9 Desember 2017.

Dalam analisisnya, Giorgio Agamben mengikuti pemilahan Aristoteles tentang dua jenis kehidupan: *bios* dan *zoe*. Kata *bios* merujuk pada hidup politis, *political life*, di mana berkat bahasa (*language*) manusia mampu keluar dari kondisi alamiahnya (kondisi kebinatangan) menjadi warga negara sebuah *polis* (negara). Sementara itu, istilah *zoe* merujuk pada hidup zoologis, jenis hidup yang mirip binatang, yang hanya memiliki *voice* (suara), yang bisa dibunuh tanpa mengganggu siapa pun.

Masalahnya, Agamben melihat bahwa dalam demokrasi modern sekarang ini, kedua konsep *bios*

dan zoe bercampur aduk, berkombinasi, dan tidak bisa dipisahkan lagi. Demokrasi modern sebagai sebuah "mesin" mempraktikkan kekuasaannya sedemikian rupa sehingga *bios* (*political life* warga negara) direduksi menjadi sekadar catatan angka. Dalam negara demokrasi, seperti di Indonesia, tiap orang harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang biasanya berkaitan dengan nomor BPJS, NPWP dan rekening bank. Paspor biometri, nomor HP, kode akun media sosial, nomor STNK adalah angka-angka yang menunjukkan identitas seseorang sebagai warga negara.

Dengan teknik algoritma, bahkan apa pun yang menjadi minat kuliner atau politis seseorang bisa dijadikan angka dengan cepat. Analisis siber dengan kilat bisa melacak identitas warga negara. Dipraktikkan secara demikian, di mata Agamben, demokrasi mengalami transubstansiasi genetik menjadi rezim totaliter.

Demokrasi (*bios politikos*) pada praktiknya melakukan *bestialisasi* (pem-binatang-an) warga negara. Manusia direduksi menjadi angka-angka yang mudah dilacak. Dalam sistem ini, setiap saat warga negara bisa "ditanggalkan" status politisnya, dijadikan "binatang" yang bisa "dilenyapkan". Agamben eksplisit menyebut kasus Guantanamo. Kita bisa melihat kasus Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di banyak negara yang menunda status politis seseorang. Dengan menempelkan kategori *refugee*, seseorang diturunkan statusnya ke *bare-life*, hidup-telanjang.

Warga negara (*bios politikos*) yang didevaluasi dari derajat politisnya mendekati *zoe* disebut oleh Agamben sebagai *homo sacer*. Ia masih disebut *homo* (manusia), tetapi tanpa hak politis (bukan lagi *bios politikos*). Ia masih manusia dalam arti sebagai *bare life*, *vita nuda*, *hidup telanjang*. Namun, sebagai *hidup telanjang*, ia juga tidak bisa dikatakan sebagai *zoe* (karena manusia adalah manusia, bukan binatang). *Homo sacer* adalah sebuah kategori *suspended* (menggantung): tidak lagi terhitung di kalangan *bios* tetapi juga bukan *zoe*.

Istilah *homo sacer* arti harafiahnya adalah *sacred man*, *manusia yang suci*. Istilah ini diambil Agamben dari tradisi hukum romawi. Menurutnya, *homo sacer* adalah istilah yang paradoksal. Di satu sisi, manusia dikatakan *sacred* justru karena ia telah ditanggalkan dari hak-hak politisnya (dieksklusi dari masyarakatnya). Terlepas dari perlindungan hukum,

orang yang terbuang dari masyarakat, *homo sacer* boleh dibunuh siapa pun dengan impunitas. Namun, di sisi lain, status *sacred* ini aneh, karena justru mengindikasikan bahwa ia tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan religius apa pun. Di mata Agamben, setiap orang yang hidup pada era demokrasi saat ini adalah *homo sacer*. Meski tampaknya hidup normal, sebenarnya kita semua sudah mati (*the living dead*, bdk. Agus Sudibyo, "Penjelasan Istilah Kunci", hlm. xxiii).

Dari temuan istilah *homo sacer*, Agamben membuat teori bahwa prosedur resmi *negara* untuk meng-*homo sacer*-kan warganya adalah lewat *state of exception* (situasi darurat). Dalam keadaan darurat militer misalnya, semua warga tiba-tiba kehilangan hak politisnya: a) tidak boleh keluar rumah di atas jam 22.00, b) internet diputus sehingga hak komunikasi ditanggalkan, c) dilarang berkumpul di atas lima orang tanpa seizin yang berwenang. Pada titik ekstremnya, ketika situasi darurat menjadi genting, makan dan minum pun dijatah oleh negara.

Contoh aktual *state of exception* bisa dilihat di kalangan para pengungsi yang tinggal di Rudenim: a) tidak boleh bekerja, b) tidak boleh terlibat kegiatan politik, c) hanya boleh makan, minum dan tidur sesuai jatah yang disediakan penampung.

Mirip dengan para pengungsi yang hanya memiliki *bare life*, demokrasi normal sehari-hari saat ini, menurut Agamben, sebenarnya adalah praktik terus-menerus *state of exception*.

Siapa yang berhak mendekritkan *State of Exception*? *The Sovereign* (Yang Berdaulat) yang merupakan gabungan dua hal: *potestas* (*power*) dan *auctoritas* (*authority*). Sebagai *potestas* (*constituted power*) ia adalah *power of law*, pemimpin eksekutif tertinggi sesuai UU yang ada. Namun sebagai *auctoritas* (*kewenangan, constituting power*) ia bersifat *beyond the law*. Karena bersifat *beyond the law*, Yang Berdaulat bisa mendekritkan *the state of exception* sehingga semua hukum yang ada ditanggalkan. Dalam sistem demokrasi, wajah Yang Berdaulat sebagai *auctoritas* memiliki *the right to kill, the power of life and death* (bdk. Agus Sudibyo, "Penjelasan Istilah Kunci", hl. xix-xxii).

Demokrasi yang totaliter seperti itu tampak secara internal dalam tiap demokrasi di sebuah negara, tetapi juga tampak dalam praktik mondial sebagaimana dilakukan PBB dan Amerika Serikat yang menjadikan

negara dunia ketiga sebagai *bare life*. Segala tindakan unilateral negara maju (Barat) selalu dimulai dengan *state of exception* untuk menciptakan kesan bahwa negara yang akan diintervensi adalah negara sekarat sehingga perlu dibantu.

*State of exception* adalah dispositif (sarana) legal yang dipakai untuk mempraktikkan kekuasaan absolut Yang Berdaulat kepada warganya, entah di level internal sebuah negara maupun di level mondial oleh negara-negara demokratis tua.

“

Dalam demokrasi, menurut Agamben, semua warga negara dianggap berpotensi menjadi teroris. Pemaksaan metode biometri (pada paspor) adalah peminatanganan terhadap warga negara. Mirip rezim komunis Uni Soviet yang selalu berteriak mengingatkan warganya “revolusi belum selesai”, sehingga harus terus bertempur, demokrasi saat ini pun demikian.

#### Apresiasi

Tak seorang pun mengidealkan demokrasi. Dalam jargon umum, demokrasi dipilih bukan karena ia sistem ideal. Dalam politik tidak ada sistem yang ideal. Semua sistem politik adalah busuk. Namun, dibandingkan dengan semua sistem yang ada (Aristokrasi, Oligarki, Plutokrasi, Khilafah, Tirani atau kediktatoran) yang jelas-jelas busuk, demokrasi adalah *minus malum (a lesser evil)*, sebuah pilihan yang keburukannya lebih sedikit. Demokrasi dipilih karena dianggap paling kurang busuknya dibandingkan sistem lain yang ada.

Teori Agamben tentang demokrasi sangat orisinal dan sangat mengganggu. Ia sama sekali tidak melihat demokrasi sebagai *lesser evil*, ia justru melihatnya sebagai *evil*. Pemikir komtemporer lain, Jacques

Rancière juga mengkritik demokrasi karena ia melihat demokrasi adalah tatanan oligarkis (*police*). Namun Rancière masih memberi harapan karena yang utama dari demokrasi adalah *skandal kesetaraan*, sehingga di mana ada gangguan pada *police* di situ demokrasi masih nyata. Agamben, sebaliknya, meningkatkan kritik dengan radikal: demokrasi adalah sistem totaliter seperti kamp konsentrasi.

Dalam demokrasi, menurut Agamben, semua warga negara dianggap berpotensi menjadi teroris. Pemaksaan metode biometri (pada paspor) adalah peminatanganan terhadap warga negara. Mirip rezim komunis Uni Soviet yang selalu berteriak mengingatkan warganya “revolusi belum selesai”, sehingga harus terus bertempur, demokrasi saat ini pun demikian. Warga negara selalu ditakut-takuti dengan ucapan “darurat”. (Jordan Skinner, 17 Juni 2014, <https://www.versobooks.com/blogs/1612-thought-is-the-courage-of-hopelessness-an-interview-with-philosopher-giorgio-agamben>).

Dengan tesis seekstrem itu, uniknya, Agamben tidak memberi solusi. Bila demokrasi adalah kamp konsentrasi, apa sebutan yang bisa diberikan untuk rezim diktatorial Hitler atau Pol Pot yang menciptakan kamp reedukasi untuk membunuh rakyatnya sendiri? Apakah Agamben begitu pesimis dan gelap?

Untuk tuduhan pesimisme, Agamben memiliki jawaban.

“Saya sering mendengar bahwa orang menganggap saya pesimis. Pertama-tama, secara personal, saya bukan orang pesimis. Kedua, dalam soal pemikiran, tidak ada yang namanya pesimis atau optimis. Guy Debord sering mengutip salah satu Surat dari Marx yang menyatakan: ‘kondisi masyarakat yang tanpa harapan – di mana aku hidup sekarang ini – justru membuatku penuh harapan’. Setiap pemikiran yang radikal selalu memosisikan diri sebagai keputusan yang ekstrem. Simone Weil menulis: ‘Saya tidak suka dengan orang-orang yang suka menghangatkan hati mereka dengan harapan-harapan kosong’. Menurut saya, **pemikiran itu tak lain adalah keberanian untuk tidak berharap**. Bukankah itu sebuah optimisme dalam bentuk tertinginya?” (bdk. Jordan Skinner).

Agamben merasa dirinya bukan orang pesimis. Pemikiran yang menggambarkan “rasa putus asa ekstrem” di depan demokrasi justru menurutnya

adalah pemikiran radikal yang tak bisa dikenai *labelling* pesimisme atau optimisme. Berpikir secara radikal, bagi Agamben adalah keberanian bukan untuk mencari-cari harapan palsu, melainkan untuk sungguh menghadapi situasi tanpa harapan. Tesis Agamben ini mirip Heidegger yang dalam seluruh pikirannya yang gelap menyatakan bahwa keberanian paling top adalah saat orang memiliki keteguhan hati di depan *Ada yang Tiada* (Kematian).

Agus Sudibyo mencoba mengurangi derajat radikalitas Agamben dengan mengatakan bahwa “kamp konsentrasi” di dalam demokrasi mesti dipikirkan bukan sebagai sebuah aktualitas melainkan sebagai sesuatu yang *laten* saja (sebuah kritik imanen atas demokrasi, hl. 252). Ini berkaitan dengan analisis rumit Agamben tentang *adunamia* (*im-potency*) yang selalu melekat dalam sebuah proses potensi menjadi aktus.

Pernyataan “demokrasi adalah kamp konsentrasi” menjadi lunak bila yang dimaksud Agamben adalah bahwa dalam demokrasi, secara implisit selalu ada kedaruratan-kedaruratan yang secara *laten* menempeli praktik-praktiknya.

Bila ditafsir demikian, teori Agamben bisa menjadi kritik yang bagus untuk sistem demokrasi yang sering kali hobi mengaktualkan apa yang *laten* ini dalam politik sehari-hari. Namun, salah satu kekurangan Agamben adalah saat ia hanya menyoroti sisi pemerintah (*the sovereign*, Yang Berdaulat) yang menyalahgunakan klaim kedaruratan.

Diterapkan di Indonesia, “filsuf ILC” (julukan untuk Rocky Gerung) dan “filsuf istana” (julukan untuk Ahmad Sahal) rupanya sepakat bahwa di Indonesia justru para *buzzer* di medsos (artinya rakyat sendiri) yang sedikit-sedikit berteriak memaksakan opini bahwa “kita sedang dalam keadaan darurat”. Itu betul sekali. Bahkan dalam opini pribadi penulis, media pun tak kalah garang dalam memaksakan opini kepada pemerintah bahwa kita sedang dalam keadaan darurat. Opini yang dibentuk *Koran Tempo* sepanjang tanggal 7-19 September 2019 luar biasa menyudutkan pemerintah. *Koran* dan *Majalah Tempo* mati-matian membela malaikat bernama KPK yang sedang darurat mengalami sekarat maut. “KPK Dilahirkan oleh Mega, Mati di Tangan Jokowi”, “(KPK) Sejengkal Menuju Ajal”, “Selamat Jalan KPK”, bahkan dengan tuduhan tendensius “Enak Zamanku, Toh (dengan *cover* wajah Jokowi *dadah dadah* seperti Soeharto)” (bdk.

halaman muka *Koran Tempo* tanggal 7-8, 11, 12, 19 September 2019). Sampul muka *Majalah Tempo* edisi 16-22 September 2019 bahkan tega meminokiokan (bayangan) Jokowi. KPK mati, Orba yang otoriter balik lagi dengan Jokowi. Ini situasi darurat! Dalam keributan itu semua, bukan pemerintah (*the sovereign*) yang menggunakan sarana kedaruratan untuk mempraktikkan kekuasaannya. Di era sekarang, saat “kekuasaan tersebar di mana-mana”, rakyat dan media ternyata juga hobi mengibarkan bendera kedaruratan.

Beberapa celah untuk mengkritik tesis Agamben mulai kelihatan. Posisi Agamben hitam putih dan kurang melihat dengan teliti realitas politik kekinian yang serba abu-abu dan membingungkan.

“

Namun, apa yang akan dilakukan Gubernur Jakarta yang merevitalisasi trotoar di Cikini Raya untuk nantinya mengundang PKL berjulan? Warga jadi pusing. Kalau gubernur (pemerintah) sendiri menabrak aturan, lalu bagaimana? Tiba-tiba warga terlempar ke *state of confusion* karena sebuah aturan dibuyarkan oleh pemangkunya sendiri.

#### Kritik: mesin kadang tak sempurna

Kritik Agamben untuk demokrasi bisa dipahami bila kita pernah hidup dan mengalami demokrasi di negara maju (semisal Italia atau Prancis). Kedaruratan yang digambarkan Agamben memang nyata dan riil. Eropa adalah negara hukum. Sekali hukum disahkan, maka peraturan mengikat dan dirasakan dampaknya sehari-hari.

Setelah peristiwa serangan teroris atas *World Trade Center* di New York tahun 2001 (terkenal dengan 9/11), hidup warga negara berubah drastis. Warga selalu diingatkan akan bahaya teroris lewat pengumuman televisi, radio, dan media. Di

stasiun *subway* (semacam MRT), bandara, kantor pemerintah, tentara hadir, dan warga diingatkan agar melaporkan ke pihak berwajib bila melihat ada "bungkusan mencurigakan". Tong-tong sampah jalanan diganti plastik, dan *metal detector* menghadang warga di pintu masuk kampus maupun di gedung pemerintahan. Semua itu adalah aturan yang dibuat pemerintah untuk mengingatkan warga bahwa Prancis sedang dalam situasi "darurat terorisme". Setelah pembantaian teroris di gedung teater Bataclan (13 November 2015) yang menewaskan ratusan warga sipil, kota Paris sampai sekarang dipenuhi tentara yang berjaga-jaga di depan sekolah, gedung pemerintah, objek vital, dan pemukiman Yahudi. Suasana darurat menjadi akut. Karung pasir ditumpuk di depan sekolah, dan mobil tak boleh parkir dekat sekolah.

Gambaran Agamben tentang demokrasi sebagai mesin yang efektif dan konsisten, di mana lewat bio-politik mencampuradukkan *bios* dan *zoe* dan lewat *state of exception* menjadikan warga negara terdevaluasi menjadi *bare life*, **mengandaikan bahwa mesin berjalan konsisten dan sempurna**. Dalam arti itu, Agamben benar bahwa "demokrasi menjadi kamp konsentrasi". Ibarat mobil, demokrasi di Italia atau di Prancis seperti mesin Ferrari atau Lamborghini. Mesinnya pakem, cara menjalankan tinggal mengikuti petunjuk, dan kalau ada apa-apa tinggal ke bengkel resmi. Orang tinggal ikut aturan, mesin berjalan dengan *ciamik*. Namun apa semua demokrasi sebegitu? Teori Agamben mandeg manakala di Indonesia ini mesin demokrasi justru tidak terlalu logis dan kadang bingung sendiri.

Landasan demokrasi adalah *rule of law* (berkuasanya hukum) dan *law enforcement* (penegakan hukum). Pemerintah adalah pihak pertama yang menjalankan hukum tersebut. Pertanyaannya: benarkah pemerintah paham dengan hukumnya sendiri, benarkah hukum dibuat untuk ditaati (atau malah untuk dilanggar)?

Di Jakarta, di mana-mana dipasang poster "Perda No. 8 Th. 2007, Pasal 25 Ayat 2" yang melarang penggunaan trotoar untuk berjualan dengan ancaman pidana 10-60 hari, atau denda Rp100 ribu sampai Rp20 juta. Namun, apa yang akan dilakukan Gubernur Jakarta yang merevitalisasi trotoar di Cikini Raya untuk nantinya mengundang PKL berjualan? Warga jadi pusing. Kalau gubernur (pemerintah) sendiri

menabrak aturan, lalu bagaimana? Tiba-tiba warga terlempar ke *state of confusion* karena sebuah aturan dibuyarkan oleh pemangkunya sendiri.

Mirip *state of exception*, banyak warga Indonesia bingung. Semua aturan ada, namun sepertinya tidak ada juga. Mobil parkir di mana-mana seenaknya, orang melawan arus, diskriminasi di bus Trans Jakarta dan di Sekolah Negeri terhadap kaum non-muslim, hujatan rasialis (terhadap orang Cina, Papua, maupun kaum kafir) terjadi di depan mata semua orang. Warga bingung, pemerintah sepertinya juga bingung.

Demokrasi totaliter yang digambarkan Agamben tidak terjadi di Indonesia, karena mesin demokrasi belum kokoh. Ibarat mobil, demokrasi di Indonesia seperti bajaj: mesinnya bisa dibongkar ditambah sulam oleh siapa saja tanpa harus ke bengkel resmi. SOP? Pasti ada, tapi tidak ada juga tidak masalah.

Sebut saja soal NIK yang nantinya diharapkan terintegrasi dengan BPJS, NPWP, Paspor, rekening bank serta nomor HP. Bila integrasi terjadi, semua akan mudah di Indonesia, dan mungkin demokrasi naik satu tingkat menjadi mobil atau ojek *online*. Tetapi, apa yang terjadi dengan aturan registrasi nomor HP? Banyak yang taat melakukan, tetapi lebih banyak yang tidak melakukannya. Dengan memberikan identitas fiktif pun nomor HP berfungsi lancar. Akibatnya, sampai hari ini para koruptor dan oknum mafia kasus korupsi (entah di Kepolisian atau di KPK) gampang menegosiasikan kasus. Mereka membeli HP murahan dan nomor baru. Setiap habis berkomunikasi, HP dan nomornya dibuang. Akibat sistem registrasi yang unik ini, hidup sehari-hari juga diteror SMS yang mengabarkan bahwa Anda "menang undian 75 juta atau 100 juta".

Mengapa aturan registrasi nomor HP tidak ditegakkan? Jawabannya aneh: aturan mana yang hendak ditegakkan? Ada banyak aturan yang saling meniadakan sehingga menciptakan keonggaran. Entah bingung atau sengaja, pemerintah tampaknya tidak berminat memiliki aturan yang jelas. Apa alasannya? Entahlah, mungkin karena ada banyak kepentingan di belakang itu semua. Padahal, seandainya aturan registrasi nomor HP tegas, seperti di Barat atau di Cina, pekerjaan polisi dan pejuang anti korupsi akan gampang. Tinggal *follow the number*, maka para koruptor dan mafia kasus tertangkap semua. Karena soal kecil registrasi nomor HP yang tidak jelas, di Indonesia ini, meski KPK memiliki,

selama 17 tahun, privilese penyadapan yang luar biasa, hasilnya tidak sekinclong yang diimpikan. Terlalu banyak “dalang” bermain sehingga mesin demokrasi Indonesia dipertahankan pada level bajaj.

Teori politik Agamben sangat khas Barat: bangsa yang disiplin, ketat berpikir, memiliki etos tinggi (tidak korupsi, tidak *ngakalin* orang lain). Imajinasi ini cocok dengan karakter negara totaliter (seperti Cina) yang memang mewajibkan mesin penguasa solid dan tertib. Namun di negara Indonesia, karena mesinnya banci (beroda dua tidak, beroda empat pun bukan), maka demokrasi juga belum menjadi kamp konsentrasi.

#### Penutup

Tesis demokrasi sebagai kedaruratan dalam praktik sehari-hari – entah itu pemerintah atau rakyat yang meneriakannya – menyingkapkan karakter lain cara Agamben maupun orang kebanyakan memikirkan politik secara hitam putih. Agus Sudibyo (hl. 225-236) menunjukkan bahwa pemikiran politik Agamben cenderung esensialis. Meski posmo, anehnya Agamben malah kembali ke esensialisme dalam menafsirkan politik. Mengapa? Pertama, karena Agamben salah baca tentang teori *bios* dan *zoe* dari Aristoteles (bdk. Agus Sudibyo, hl. 217-221). Konsepsi kehidupan yang bersifat evolutif dan tidak saling mengeklusi di Aristoteles dibaca secara keliru oleh Agamben sebagai pertentangan (*bios* berlawanan dengan *zoe*). Kedua, meski tidak disebutkan dalam buku ini, Agamben menerapkan konsep-konsep *teoretis* (artinya analisis tentang potensi-aktus di *Fisika* dan *Metafisika*) Aristoteles ke ranah *praxis* (ranah tindakan manusia) yaitu politik. Ini adalah *category mistake*, kesalahan dalam menerapkan kategori. Aristoteles sendiri anti demokrasi, tetapi tidak ekstrem seperti Agamben. Di mata Aristoteles, saat berbicara politik, di ranah *praxis*, orang harus mengambil jalan tengah di antara dua ekstrem a) di satu sisi, *oligarki* (pemerintahan oleh sedikit orang terbaik dan elite) *versus* b) di sisi lain, *demokrasi* (pemerintahan oleh banyak orang miskin yang kacau). Bentuk *politeia* yang tepat di mata Aristoteles adalah *demokrasi kaum kelas menengah*: yang memegang kedaulatan adalah orang yang tidak miskin dan tidak kaya, dan jumlah penguasanya pas, tidak banyak dan tidak sedikit.

Agamben menggunakan temuannya di buku Aristoteles *Metafisika Theta* 1047a 24-6 tentang *adunamia* (*im-potency*) untuk analisis politiknya. Konsep ini normalnya dipahami sebagai *steresis* (*lack of form*), yang sebagaimana potensi dan aktus, biasanya hanyalah kategori “dalam pikiran” (*katalogon*). Namun di tangan Agamben *im-potency* menjadi barang ontologis dan menjadi tesis kunci filsafat politiknya. Menurut penulis, kekeliruan menerapkan kategori ini yang menjelaskan mengapa analisis politiknya bersifat hitam putih (seperti 2+2 pasti sama dengan 4 dalam kajian matematika atau fisika).

Bila mengikuti Aristoteles, politik dan etika adalah wilayah *praxis*, di mana kegunaan dan kebenarannya mesti ditentukan bersama. Bila ilmu *poiesis* menggarap benda mati (sehingga kegunaan jauh lebih penting daripada kebenaran), dan ilmu teoretis mengontemplasikan pikiran si pemikir sendiri (sehingga kebenaran menjadi nomor satu sambil membuang segala pertanyaan tentang kegunaan), maka *praxis* adalah wilayah di mana manusia bertemu dengan manusia lain, sehingga dialog menjadi kunci untuk menentukan bersama kegunaan dan kebenaran yang bersifat abu-abu di ranah ini. Dalam domain *praxis*, kalau anakronis sedikit menengok kembali ke awal bulan September 2019, silakan yang pro-revisi KPK dan anti-revisi KPK berdiskusi sehebat-hebatnya, namun dengan kesadaran bahwa tidak ada kebenaran atau kesalahan absolut di situ. Selain karena politik adalah ranah *praxis* (dialogis), di iklim demokrasi bajaj, sudah jelas dengan sendirinya bahwa di belakang tiap posisi selalu ada cukongnya masing-masing. ●

**Dr. A. Setyo Wibowo,**  
dosen STF Driyarkara, Jakarta.

**Red.** Naskah ini merupakan olahan ulang dari naskah untuk bedah buku Agus Sudibyo *Demokrasi dan Kedaruratan*, di Teater Utan Kayu, 20 September 2019. Tiga pembedah buku adalah Rocky Gerung, Ahmad Sahal, dan A. Setyo Wibowo. Acara dimoderatori oleh Yustinus Prastowo.